

Volume: 10
Nomor : 3
Bulan : Agustus
Tahun : 2024

E-ISSN: 2656-940X
P-ISSN: 2442-367X
URL: jurnal.ideaspublishing.co.id



Evaluasi Program Ketahanan Pangan dalam Ketersediaan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau

Christoforus Freddy
Universitas Terbuka

Entang Adhy Muhtar
Universitas Padjadjaran

Heri Wahyudi
Universitas Terbuka

Pos-el: ut.christoforus@gmail.com
entang.am0405@gmail.com
heriw@ecampus.ut.ac.id

DOI: [10.32884/ideas.v10i3.1744](https://doi.org/10.32884/ideas.v10i3.1744)

Abstrak

Peningkatan aktivitas eksplorasi kawasan pesisir dan laut dapat merusak lingkungan dan mengancam kelestarian ekosistem. Diperlukan upaya pembaharuan tata kelola berlandaskan nilai lokal. Artikel berupaya memperkenalkan nilai lokal dalam ritual *Letu Ai* dan *Lara Lowa* sekaligus menawarkan model tata kelola berbasis nilai lokal. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Telaah ritual mengurai nilai lokal: harmonisasi ekosistem; religiusitas, integrasi sosial dan eksistensi kelembagaan adat. Pembaharuan tata kelola diarahkan dengan meningkatkan titik dan sistem konservasi; meningkatkan kesadaran etis berupa sikap dan perilaku penghormatan lingkungan; intervensi pemerintah daerah melindungi eksistensi kelembagaan adat, melibatkan peran aktif kaum muda dalam memelihara warisan leluhur.

Kata Kunci

Evaluasi program, ketahanan pangan, ketersediaan pangan

Abstract

Limitations and the absence of an effective working mechanism, not yet well accessed, and the assessment of PPH (Pola Pangan Harapan) has not met the minimum service standard value of 83.2 in Malinau Regency. In this research the theory used refers to the dimensions/characteristics of programme evaluation from William Dun through 4 (four) stages (1) Value Focus, (2) Fact-Value Interdependence, (3) Present and Past Orientation, and (4) Value Duality. The results of the analysis show that the per capita availability of Malinau Regency's Total Food Balance (NBM) for kcal/day energy availability is 2,663 and the total score of Pola Pangan Harapan (PPH) at the availability level of Malinau Regency in 2021 is 81.50, explaining that the resulting PPH score is still below the National SPM of 83.2.

Keywords

Programme evaluation, food security, food availability

Pendahuluan

Pengkajian program kebutuhan pangan di Indonesia saat ini yang belum dapat terpenuhi mengingat agribisnis di Indonesia tidak dapat diawasi dengan baik, untuk saat ini pekerjaan

peternak dituntut untuk membangun pangan efisiensi di Indonesia (Soedarto & Ainiyah, 2022). Tiga permasalahan utama yang harus diperhatikan dalam memahami hal ini adalah: (1) ketersediaan pangan yang berasal dari penggunaan optimal sumber daya lokal; (2) ketersediaan pangan yang terintegrasi dengan seluruh anggota masyarakat dari segi fisik dan ekonomi; dan (3) pola konsumsi makanan untuk mempromosikan gaya hidup yang sehat, aktif, dan produktif (Rahman, 2018).

Dalam pelaksanaan pembangunan ketahanan pangan di wilayah Kabupaten Malinau tahun 2016 s.d. 2019 (data saking pelaporan kinerja instansi Ketahanan Pangan) mengalami berbagai permasalahan baik yang bersifat teknis maupun non teknis, adapun tantangan dan permasalahan yang ditemui adalah.

1. Tingkat perhitungan; kebutuhan atau nilai strategi dan proyek Ketahanan Pangan yang umumnya tidak diketahui oleh masyarakat umum, gagasan penciptaan dan sirkulasi yang tidak seimbang antar musim, dan kerangka tak berdaya yang menyebabkan biaya transportasi tinggi. Hal ini menyebabkan keterbukaan keuangan daerah menjadi rusak sehingga keadaan ketergantungan pasokan pangan dipengaruhi oleh berbagai elemen, termasuk terganggunya tujuan dan sasaran ketahanan pangan yang kemudian berdampak pada nilai standar penilaian program. maksud dan tujuan ketahanan pangan.
2. Tuntutan evaluasi: Nilai-nilai yang menjadi landasan dari evaluasi memiliki karakter ganda, karena dianggap sebagai tujuan yang ingin dicapai dan juga sebagai sarana untuk mencapainya. Dalam hal tersebut penulis mendapatkan masih adanya kekurangan yang tidak mengedepankan dualitas nilai sebagai dasar menentukan evaluasi sebagai tujuan kebijakan program dan menentukan evaluasi sebagai cara atau tindakan kebijakan program pangan, yang mengakibatkan perhitungan hasil dari tingkatan kemajuan atau kemunduran sebuah program dan kegiatan tidak menjadi penentu atas manfaat atau kegunaan sosial kebijakan yang berpengaruh pada acuan untuk perhitungan-perhitungan selanjutnya demi meningkatkan hasil (Epriadi dkk., 2023).

Tabel 1
 Perbandingan skor Pola Pangan Harapan (PPH) tahun 2019 dan 2020

Indikator Kerja Utama	Target PPH 2019	Realisasi PPH 2019	% Capaian 2019	Target PPH 2020	Realisasi PPH 2020	% Capaian 2020	Perbandingan dengan Tahun Sebelumnya
Padi-padian	21,75	25,00	115	22,19	25,00	113	100 %
Umbi-umbian	2,33	2,50	90	2,39	2,50	105	119 %
Pangan Hewani	14,11	11,10	90	14,40	19,20	133	151 %
Minyak dan Lemak	3,18	5,00	157	3,24	5,00	154	100 %
Buah/ Biji Berminyak	0,64	0,60	78	0,64	0,30	47	60 %
Kacang-kacangan	10,29	8,20	73	10,50	8,40	80	112 %
Gula	2,33	2,50	107	2,38	2,50	105	100 %
Sayuran dan Buah	20,16	23,90	119	20,57	17,40	85	73 %
Lain-lain	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	74,82	79,20	106	76,31	80,30	105	101 %

Sumber: RENSTRA dan Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan

Keterangan perbandingan:

1. Skor PPH ketersediaan target 76,31 dengan capaian evaluasi sebesar 80,30 dengan kelebihan peningkatan 105 % dikarenakan terdapat bahan Padi-padian dari target 21,19 yaitu tercapai 25,00 Kalori/Hari/Tahun (sesuai skor nasional) dikarenakan meningkatnya produktivitas padi lokal untuk kebutuhan petani sendiri berupa beras konsumsi dan tidak diperjualbelikan (masyarakat umum perkotaan sebagian besar mengkonsumsi beras dari luar);
2. Perbandingan Skor PPH tahun 2020 dengan realisasi tahun sebelumnya (tahun 2019); tahun 2020 sebesar 80,30 kalori dan realisasi tahun sebelumnya (tahun 2019) sebesar 79,20 kalori, maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan bahwa pencapaiannya sebesar 101 %.

Isu ketahanan pangan berpusat di sekitar hambatan dan kekurangan sistem kerja yang layak secara lokal dalam bereaksi terhadap ketidakpastian pangan (Veronica dkk., 2022), terutama dalam alokasi makanan untuk individu yang membutuhkan kemampuan terbatas dan akses ke jaringan yang kurang makmur untuk modal, inovasi, data pasar dan memamerkan aset. kesulitan memasuki angkatan kerja dan tidak fokus pada tujuan, persyaratan dan kapasitas jaringan budidaya negara yang diakui membingungkan dan saling terkait satu sama lain, dan tidak berfokus pada dualitas kualitas sebagai alasan untuk memutuskan penilaian sebagai tujuan strategi program dan memutuskan penilaian sebagai metode atau kegiatan strategi untuk program pangan, yang menghasilkan perkiraan konsekuensi dari tingkat kemajuan atau kerusakan suatu program dan tindakan tidak menjadi penentu keuntungan atau keuntungan sosial dari pengaturan yang mempengaruhi referensi untuk perhitungan-perhitungan lebih lanjut untuk bekerja pada hasil (Hasid dkk., 2022).

Sebagai upaya memperkuat keberadaan *research gap*, disajikan beberapa penelitian terdahulu untuk menemukan perbedaaan sebagai kebaharuan penelitian. Pertama, pangan merupakan salah satu isu penting, karena 16 dari penggunaan terbesar keluarga masih untuk pemanfaatan pangan (Wijaya, 2017). Peneliti terdahulu melakukan review pengendalian pangan dengan inovasi pemasangan posyantek, sementara penulis melakukan analisis terhadap pengendalian pangan melalui penilaian akhir yaitu nilai pada tabel Pola Pangan Harapan (PPH). Kedua, Dinas Ketahanan Pangan bekerja sama dengan distributor besar seperti BULOG untuk meningkatkan stok pangan pemerintah daerah. Dalam hal ini, stok pangan yang dimaksud adalah beras, dan pemerintah daerah saat ini memiliki stok beras yang mencukupi (Maksum dkk., 2019). Peneliti terdahulu melakukan review pengendalian pangan dengan melakukan kerjasama oleh distributor besar seperti BULOG, sementara penulis melakukan analisis terhadap pengendalian pangan melalui kerja sama dengan distributor atau agen lokal sebagai *stakeholder*. Ketiga, Dari enam indikator evaluasi, yakni efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan, lima di antaranya telah terpenuhi sesuai dengan rencana (Wahyuni & Shaliza, 2021).

Hasil dari penelitian di atas mencoba memberikan keyakinan bahwa sebenarnya daerah mampu melaksanakan ketahanan pangan tetap dan harus dilaksanakan dengan berbagai cara dalam penanganan yang telah ditentukan. Untuk itulah perlu pengkajian tentang kesiapan sumberdaya manusia dan bentuk kerja sama dengan berbagai *stakeholder* beserta penguatan pada pengevaluasian bentuk program untuk kesiapan ketahanan pangan. Faktor-faktor yang

diidentifikasi dengan ketahanan pangan dapat lebih dominan dengan asumsi hal itu ditunjukkan oleh bukti yang dapat dikenali dari daerah-daerah yang tidak pasti pangan. Jadi, tidak hanya meningkatkan suatu pengembangan komoditas juga teraspek lebih dalam oleh identifikasi wilayah salah satu contohnya seperti bekerja sama dengan *stakeholder* untuk menjamin ketersediaan pangan.

Metode

Penelitian ini merupakan eksplorasi yang menggunakan metodologi subjektif yang berencana mengevaluasi tugas program yang menguraikan penilaian siklus dalam mendukung pelaksanaan unsur-unsur program Administrasi Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau. Upaya-upaya apa yang dilakukan agar program-program besar para pelaksana didapat, dan daerah setempat dapat mengupayakan proyek-proyek yang memuaskan dalam rangka pelaksanaan ketahanan pangan di wilayahnya. Penelitian seperti ini digunakan karena evaluasi merupakan suatu proses yang menilai sejauh mana pencapaian tujuan dari suatu program (Conley-Tyler, 2005).

Informasi awal dalam penelitian ini adalah staf Dinas Ketahanan Pangan khususnya mereka yang bertugas mengolah data pada hasil sebuah program kemudian diikuti dengan staf atau pegawai lainnya. Dalam proses mendapatkan data selanjutnya, informan berkembang berdasarkan *snow ball sampling*. Berikut para informan yang dimaksud oleh penulis yakni Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau, 2 (dua) Orang Pegawai Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau, 4 (empat) Orang Pelaku Usaha Pangan; dan Masyarakat (*Snow Ball Sampling*/dalam proses mendapatkan data selanjutnya).

Hasil dan Pembahasan

Hasil

Sebagai indikator capaian pembangunan ketahanan pangan, Kementerian Pertanian telah menyusun standar yang dapat digunakan sebagai standar capaian pembangunan di Provinsi Kalimantan Utara dan Kabupaten Malinau.

Tabel 2

Tujuan, Indikator dan Target Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024

Sasaran	Indikator	Target
Peningkatan Pemanfaatan Ketahanan Pangan.	Indeks Keamanan Pangan Global (<i>Global Food Security Index</i>)	69,8
	Skor Pola Pangan Harapan	95,2
	Konsumsi Protein yang Mencukupi (Gram/Kapita/Hari)	2.100,0
	Prevalensi Kekurangan Gizi (%)	57,0
	Prevalensi Penduduk dengan Kerawanan Pangan Sedang atau Berat (<i>Food Insecurity Experience Scale/FIES</i>) (%)	5,0
	Ketersediaan Beras	4,0
	Ketersediaan Protein Hewani	46,8
	Akses Terhadap Beras Biofortifikasi dan Fortifikasi bagi Keluarga yang Kurang Mampu dan Kurang Gizi (% Penerima BPNT)	2,90
	Persentase Pangsa Pangan Organik (%)	100

Sumber: RENSTRA 2021 – 2026 Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau.



Jika ketersediaan energi merata dibandingkan dengan perkiraan kebutuhan, diduga tidak ada masalah kekurangan gizi serius. Namun, jika ketersediaan energi jauh lebih rendah atau lebih kecil dari perkiraan kebutuhan, dapat menyebabkan masalah kekurangan gizi (Jamil dkk., 2021). Jumlah total skor Pola Pangan Harapan (PPH) tingkat ketersediaan Kabupaten Malinau pada tahun 2021 adalah 81,50. Hal ini menjelaskan bahwa skor PPH yang dihasilkan masih berada di bawah Standar Pangan Minimum (SPM) Nasional, yang merupakan 83,2. Untuk data penganggaran Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3
 Pengalokasian Anggaran Dinas Ketahanan Pangan Tahun Anggaran 2022

No.	Program	Sub Kegiatan	Target	Pagu Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.	40 Jenis	Rp 40.000.000
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.	2 Jenis	Rp 11.350.000
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.	20 Kali	Rp 100.000.000
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya-biaya Pemeliharaan dan berbagai Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.	1 Unit	Rp 28.650.000
2	Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD.	5 Dokumen	Rp 20.000.000
		Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal.	30 Orang	Rp 50.000.000
		Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan.	1 Dokumen	Rp 50.000.000
3	Program Penanganan Kerawanan Pangan.	Pemberdayaan Masyarakat dalam Berbagai Jenis Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal.	7 Kelompok Wanita Tani	Rp 300.000.000
		Penyusunan, Pemuktahiran dan Analisa Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan.	1 Dokumen	Rp 75.000.000
4	Program Pengawasan Keamanan Pangan.	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten Kota.	1 Dokumen	Rp 50.000.000
			Jumlah	Rp 725.000.000

Sumber: Rencana Kerja (RENJA) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2022.

Untuk data produksi komoditas pangan lokal dan impor periode tahun 2022, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4

Produksi Komoditas Pangan dan Ketersediaan Energi dan Protein Tahun 2022

No.	Komoditas	Produksi (Ton)	Impor (Ton)	Total (Ton)
1	Komoditas Beras	6.877	2.875	9.752
2	Komoditas Jagung Kering	131	200	331
3	Komoditas Kedelai	-	685	685
4	Komoditas Kacang Tanah	-	45	45
5	Komoditas Ubi Kayu	2.351	200	2.551
6	Komoditas Ubi Jalar	23	55	78
7	Komoditas Sayur	1.287	2.840	4.127
8	Komoditas Buah – buahan	6.230	1.336	7.566
9	Komoditas Minyak Goreng	-	1.305	1.305
10	Komoditas Gula	-	1.235	1.235
11	Komoditas Daging Sapi	21	8	29
12	Komoditas Daging Ayam	600	364	964
13	Komoditas Telur	517	1.585	2.102
14	Komoditas Susu	-	1.020	1.020
15	Komoditas Ikan	192	1.181	1.373
Jumlah		18.229	14.934	33.163

Sumber: Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2022

Pembahasan

Uraian di atas memperlihatkan bahwa faktor selain hasil pangan dari melaksanakan program ketahanan pangan adalah hasil dari kerja sama pengumpulan ketersediaan pangan berubah bentuk menjadi tindakan lain seperti membuka ruang informasi dan munculnya pandangan lain terhadap strategi atau cara mengantisipasi permasalahan di dalam transportasi pemasukan barang dari luar daerah ke dalam Kabupaten Malinau yang tidak hanya tentang pengelolaan ketersediaan pangan.

Dari hasil temuan yang sudah dikemukakan di atas, mengenai dualitas nilai dengan berbagai aspek pendukung yang telah ditentukan yaitu persiapan yang dilakukan, bagaimana target/sasaran, dan faktor selain hasil pangan dari melaksanakan program ketahanan pangan yang masing-masing aspek menjelaskan apa yang terkandung di dalam dualitas nilai melalui hasil dari wawancara.

Untuk dualitas nilai dalam persiapan yang dilakukan dari pelaksanaan program ketahanan pangan adalah menentukan atau mensinkronkan indikator kinerja dengan bentuk indikator kinerja Pemerintah Pusat (Sagita, 2022), sebagai tahap awal dalam keberlangsungan berjalannya kinerja program ketahanan pangan tersebut kemudian disampaikan juga tahapan yang mempersiapkan SDM dalam mengakomodir kinerja program ini dan melaksanakan rapat koordinasi bersama dengan Dinas terkait dan Tim Kerja Program Ketahanan Pangan dan dalam menentukan bagaimana target/sasaran dari melaksanakan program ketahanan pangan adalah

dengan mengutamakan kerja sama yang solid agar tetap mempertahankan kemajuan yang signifikan terhadap hasil dari program ketahanan pangan tersebut contohnya Dinas Ketahanan Pangan melakukan pengelolaan data pangan dengan mengumpulkan data tersebut oleh dinas-dinas terkait dan Tim Kerja Program Ketahanan Pangan dan bagaimana menentukan target/sasaran dari program ketahanan pangan ini Dinas Ketahanan Pangan juga mengakomodir faktor pendukung lainnya seperti mengusulkan gedung persediaan cadangan pangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau.

Kemudian dualitas nilai dalam faktor selain hasil pangan dari melaksanakan program ketahanan pangan adalah hasil dari kerja sama pengumpulan ketersediaan pangan berubah bentuk menjadi tindakan lain seperti membuka ruang informasi dan munculnya pandangan lain terhadap strategi atau cara mengantisipasi permasalahan di dalam transportasi pemasukan barang dari luar daerah ke dalam Kabupaten Malinau yang tidak hanya tentang pengelolaan ketersediaan pangan. Semua perihal di atas memperlihatkan kerja sama sebagai penentuan dalam tahapan pelaksanaan program ketahanan pangan selain patokan kinerja, kerja sama juga sebagai faktor yang berdampak meskipun diluar dari hasil pengelolaan ketersediaan pangan tersebut, sejalan dengan penelitiannya tentang "Strategi Dinas Ketahanan Pangan dalam meningkatkan ketahanan pangan Kota Samarinda" melibatkan kerja sama dengan distributor-distributor untuk meningkatkan cadangan pangan yang dikuasai oleh pemerintah daerah (Maksum dkk., 2019).

Dalam penelitian ini terdapat permasalahan yang dapat mengesampingkan aksesibilitas pangan yang pemanfaatannya akan terbatas tanpa perluasan yang mencakup umum, permasalahan tersebut adalah keterbatasan dan belum adanya mekanisme kerja yang efektif, program yang telah dialokasikan belum terakses dengan baik oleh hampir sebagian ketua dan kelompok tani, aspirasi kebutuhan dan kemampuan masyarakat petani di pedesaan yang teridentifikasi sebagai kompleks dan saling berkaitan satu sama lainnya, dan penilaian pada PPH (Pola Pangan Harapan) belum memenuhi nilai standar pelayanan minimal yaitu 83,2. Dari perihal tersebut penulis akan mengidentifikasi bentuk kendala dan strategi dalam beberapa hasil penting sebagai berikut ini.

1. Fokus Nilai

Evaluasi program adalah suatu evaluasi yang difokuskan pada penelitian menyangkut keperluan atau nilai dari suatu kebijakan dan program yang tertera pada tabel PPH (Pola Pangan Harapan) mulai dari perhitungan energi (Kalori), persentase AKE, Bobot namun pada penelitian ini lebih memaksimalkan untuk perhitungan Skor Rill, Skor PPH, dan Skor Maks dengan mengindikasikan manfaat program ketahanan pangan, ketetapan sasaran program, dan prosedur evaluasi program. Program ketahanan pangan, ketetapan program dan prosedur evaluasi program mengarahkan bahwa kinerja sumber daya manusia pada tahapan ini telah dijalankan dengan cukup baik dan sesuai dengan prosedur. Namun, masih terdapat permasalahan di dalam pelaksanaannya antara lain yaitu terkait anggaran yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau kepada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau yang belum maksimal.

Kendala atau permasalahan pada plot fokus nilai Program Ketahanan Pangan ini, menciptakan strategi dalam penanganannya yaitu salah satunya adalah dengan

menitikberatkan permintaan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau untuk meningkatkan alokasi anggaran pada Dinas Ketahanan Pangan pada tahun berikutnya dan pada tahun 2021 telah terbit Peraturan Presiden tentang Pengembangan Ketahanan Pangan yang pada akhirnya Pemerintah Pusat dengan kendali Presiden memenuhi kelesarasan Program Ketahanan Pangan dengan meluncurkan suatu pergerakan dengan mengatasnamakan lembaga atau organisasi yaitu Badan Pangan yang secara keseluruhan akan diluncurkan atau diturunkan ke tingkat Provinsi dan Daerah, perihal tersebut secara tidak langsung akan membantu mengakomodir Ketahanan Pangan dikarenakan adanya tambahan anggaran lebih yang langsung diakomodir oleh Pusat ke Provinsi atau Daerah.

2. Interdependensi Fakta-Nilai

Evaluasi program mensyaratkan penilaian yang menyeluruh terhadap kedua "fakta" dan "nilai", untuk menentukan apakah suatu kebijakan atau program telah mencapai tingkat kinerja yang optimal atau tidak. Hal ini didasarkan pada pemahaman bahwa hasil dari kebijakan sebenarnya adalah hasil dari tindakan yang diambil untuk menangani masalah tertentu. Tabel PPH, atau Pola Pangan Harapan, digunakan sebagai tolak ukur untuk menghitung hasil atau bukti dari tingkat kinerja. Ketersediaan pangan di Kabupaten Malinau yang masih belum optimal dalam pengelolaan hasil pangan petani lokal menimbulkan faktor yang saling ketergantungan terhadap kerja sama antara Pemerintah dan pelaku usaha atau para distributor untuk penentuan program ketahanan pangan adalah pada faktor ketersediaan pangan, ditentukan karena adanya suatu timbal balik dari proses pengumpulan pangan yang saling membantu dalam memecahkan permasalahan yang didapatkan oleh pelaku usaha dalam pengumpulan pangan (Siburian & Imron, 2021).

3. Orientasi Masa Kini dan Masa Lampau

Tuntutan evaluatif berbeda dengan tuntutan-tuntutan advokatif. Hal ini dikarenakan fokusnya adalah hasil saat ini dan masa lalu. Kedua hasil tersebut diharapkan mampu menghasilkan sesuai harapan. Pada tingkat ini, tetap menggunakan Pola Pangan Harapan (PPH) sebagai metode perhitungan hasil, yang mencakup perbandingan pencapaian saat ini dengan masa depan. Selain itu, evaluasi ini juga merekomendasikan hasil tersebut sebagai acuan untuk perhitungan selanjutnya, dengan tujuan meningkatkan hasil dalam hal pangan. Secara observasi terdapat kendala atau permasalahan yaitu soal ketersediaan pangan di Kabupaten Malinau yang masih belum optimal dalam pengelolaan hasil pangan petani lokal, belum optimalnya ini mengarahkan pada tempat penyimpanan atau Gudang pangan yang memadai untuk menjaga hasil panen sebelum dilakukannya pemasaran kepada para pelaku usaha. Namun, Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau sadar akan perihal tersebut dan telah melakukan perencanaan pembuatan gudang pangan yang secara langsung akan diakomodir oleh Dinas Ketahanan Pangan dan dengan adanya perihal tersebut secara tidak langsung akan menambahkan anggaran kepada Dinas Ketahanan Pangan juga akan memudahkan mengakses pangan hasil dari petani lokal (Kurnia dkk., 2020).

4. Dualitas Nilai

Nilai-nilai yang menjadi dasar dari tuntutan evaluasi memiliki karakter ganda karena dipandang sebagai tujuan yang ingin dicapai sekaligus sebagai metode untuk mencapainya. Dengan mengkaji hasil dari analisis skor riil hingga skor Pola Pangan Harapan (PPH), kita



dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang permasalahan yang ada. Hal ini memerlukan komitmen kerja yang kokoh dari pemerintah yang bertanggung jawab atas pengelolaan pangan dan pihak-pihak distributor pangan untuk saling mendukung dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dalam kerangka ini, keberadaan nilai ganda juga mempengaruhi pencapaian kinerja, yang kemudian digunakan sebagai umpan balik dan landasan untuk memberikan penghargaan atau sanksi. Evaluasi atas kemajuan organisasi ini menjadi landasan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan tingkat akuntabilitas. Kendala dari faktor dualitas nilai ini mengarahkan pada program ketahanan pangan adalah hasil dari kerja sama pengumpulan ketersediaan pangan berubah bentuk menjadi tindakan lain seperti membuka ruang informasi dan munculnya pandangan lain terhadap strategi atau cara mengantisipasi permasalahan di dalam transformasi pemasukan barang dari luar daerah ke dalam Kabupaten Malinau yang tidak hanya tentang pengelolaan ketersediaan pangan.

Simpulan

Berdasarkan hasil dan analisis pembahasan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. Fokus Nilai: Evaluasi program menunjukkan bahwa kinerja sumber daya manusia telah dijalankan dengan cukup baik dan sesuai prosedur; 2. Interdependensi Fakta-Nilai: Ketersediaan pangan di Kabupaten Malinau masih belum optimal dalam pengelolaan hasil pangan petani lokal, menimbulkan faktor saling ketergantungan antara Pemerintah dan pelaku usaha atau para distributor. Kerja sama antara keduanya menjadi kunci dalam menentukan program ketahanan pangan, terutama dalam hal ketersediaan pangan; 3. Orientasi Masa Kini dan Masa Lampau: Evaluasi program menunjukkan permasalahan terkait ketersediaan pangan yang belum optimal dalam pengelolaan hasil pangan petani lokal. Kendala ini mengarahkan pada perlunya tempat penyimpanan atau gudang pangan yang memadai untuk menjaga hasil panen sebelum dipasarkan kepada para pelaku usaha; 4. Dualitas Nilai: Nilai-nilai yang mendasari tuntutan evaluasi memiliki kualitas ganda. Evaluasi ini tidak hanya berfungsi sebagai penilaian kemajuan organisasi, tetapi juga sebagai dasar untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Kendala dari faktor dualitas nilai ini adalah perubahan kerja sama dalam pengumpulan ketersediaan pangan menjadi tindakan lain, seperti pembukaan ruang informasi dan munculnya pandangan baru terhadap strategi atau cara mengantisipasi permasalahan di dalam transformasi pemasukan barang dari luar daerah.

Dari hasil Neraca Bahan Makanan (NBM) Kabupaten Malinau, diperoleh data Pola Pangan Harapan (PPH) tingkat ketersediaan, yaitu Padi-padian: 25.0, Umbi-umbian: 2.5, Pangan hewani: 19.6, Minyak dan lemak: 5.0, Buah/biji berminyak: 0,4, Kacang-kacangan: 8.8, Gula: 2.5, Sayuran dan buah: 17.7, dan Lain-lain: 0. Jumlah total skor Pola Pangan Harapan (PPH) tingkat ketersediaan Kabupaten Malinau pada tahun 2021 adalah 81.50. Hal ini menunjukkan bahwa skor PPH yang dihasilkan masih berada di bawah Standar Pangan Minimum (SPM) Nasional, yang sebesar 83.2

Daftar Rujukan

Conley-Tyler, M. (2005). A Fundamental Choice: Internal or External Evaluation? *Evaluation Journal of Australasia*, 4(1-2), 3-11. <https://doi.org/10.1177/1035719X05004001-202>

- Dunn, W. N. (2003). *Public Policy Analysis; an Introduction*. Prentice Hall, International Inc, Englewood Cliffs.
- Dunn, W. N. (2015). *Public Policy Analysis*. Routledge.
- Epriadi, D., Sos, S., Mardansyah, S., & Padrisan Jamba, S. (2023). *Kebijakan Publik di Indonesia: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Edu Publisher.
- Hasid, H. Z., SE, S., Akhmad Noor, S. E., SE, M., & Kurniawan, E. (2022). *Ekonomi sumber Daya Alam dalam Lensa Pembangunan Ekonomi*. Cipta Media Nusantara.
- Jamil, S. N. A., Sandra, L., Sutrisno, E., Purnamasari, S., Mardiyah, U., Fitriani, E., Saiya, H. G., Nurhayati, A., & Kamarudin, A. P. (2021). *Ekologi Pangan dan Gizi Masyarakat*. Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia.
- Kurnia, A. W., Sundari, S., & Purwanto, D. A. (2020). Implementasi Kebijakan Cadangan Pangan Nasional dalam Kondisi Keadaan Darurat di Badan Ketahanan Pangan Guna Mendukung Pertahanan Negara. *Manajemen Pertahanan: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Manajemen Pertahanan*, 6(1), 73-97. <https://jurnalprodi.idu.ac.id/index.php/MP/article/view/593>
- Maksum, S. R. I., Jamanie, F., & Alaydrus, A. (2019). Strategi Dinas Ketahanan Pangan dalam Meningkatkan Ketahanan Pangan Kota Samarinda. *Journal Pemerintahan Integratif*, 7(4), 570-581. <https://ejournal.pin.or.id/site/?p=1822>
- Rahman, S. (2018). *Membangun Pertanian dan Pangan untuk Mewujudkan Kedaulatan Pangan*. Deepublish.
- Sagita, R. (2022). *Evaluasi Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) Desa Bagan Melibur Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2020* (Thesis, Universitas Islam Riau). <http://repository.uir.ac.id/id/eprint/13919>
- Siburian, R., & Imron, M. (2021). *Dari Hutan Sampai Laut: Mendorong Pengelolaan Berbasis Masyarakat Lokal*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Soedarto, T., & Ainayah, R. K. (2022). *Teknologi Pertanian Menjadi Petani Inovatif 5.0: Transisi Menuju Pertanian Modern*. Uwais Inspirasi Indonesia.
- Suhaimi, A. (2019). *Pangan, Gizi, dan Kesehatan*. Deepublish.
- Veronica, V., Muhtar, E. A., & Milwan, M. (2022). Implementation of Leading Program for Village Building Movement. *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Budaya*, 8(2), 487–494. <https://jurnal.ideaspublishing.co.id/index.php/ideas/article/view/721>
- Wahyuni, L., & Shaliza, F. (2021). Evaluasi Kebijakan Program di Bidang Tanaman Pangan & Hortikultura dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai. *Jurnal Niara*, 14(2), 59–66. <https://doi.org/10.31849/niara.v14i2.6247>
- Wijaya, O. (2017). Strategi Pengembangan Komoditas Pangan Unggulan dalam Menunjang Ketahanan Pangan Wilayah (Studi Kasus di Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah). *Agraris: Journal of Agribusiness and Rural Development Research*, 3(1), 48–56. <https://doi.org/10.18196/agr.3144>.